

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Usaha Kerajinan Tangan Penyulaman Noken

Funisia Lamalewa, Elisabeth Lia Riani Kore

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus

email: funnisia@unmus.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan ekonomi kreatif dan dorongan memberdayakan masyarakat menjadi pemicu dilakukannya penelitian yang mana diharapkan dapat mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat pengrajin penyulam Noken dengan fokus sorotan empat prinsip kunci kesuksesan pemberdayaan. Penelitian deskriptif kualitatif ini melibatkan informan dengan teknik pengambilan snowball sampling, hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana belum terlaksananya keempat prinsip tersebut, ketidak tercapainya prinsip kesetaraan disebabkan oleh pembenaran pemosisian antara yang memberi dan yang menerima, dimana seharusnya adalah saling berbagi atau adanya timbal balik yakni setiap pihak dapat berperan sebagai memberi maupun menerima. Kebanyakan program adalah rancangan dari pelaksana pemberdayaan, keterlibatan masyarakat masih sebatas pada mobilisasi sehingga tidak adanya prinsip partisipan. Tidak berjalannya prinsip kemandirian karena dikungkung oleh pola pemberian bantuan yang tidak mencerminkan upaya membentuk kemandirian dan disadari pula bahwa kemandirian hanya terbentuk secara bertahap yaitu diawali dengan penyadaran, pelatihan hingga pengembangan, dimulai dari pembimbingan pengrajin dan secara perlahan melepas pengrajin agar mandiri dari sisi keahlian mengelola maupun ekonominya. Pelaksanaan kemandirian ini secara langsung mengisyaratkan bahwa tidak ada kemungkinan untuk dilakukan pelepasan pendampingan atau dengan kata lainnya prinsip keberlanjutan tidak terlaksana.

Kata kunci: Pemberdayaan; Ekonomi; Noken.

ABSTRACT

The development of creative economy and encouraging community empowerment are the triggers of research which are expected to be able to describe the empowerment of Noken extension craftsmen with a focus on four key principles of empowerment development. This qualitative descriptive study involved informants using snowball sampling techniques, the results showed that empowerment did not work as it should and was not carried out in accordance with these principles, the failure to achieve the principle of equality supported by the justification of backing each party could participate as giving help to receive. The special program is designed from the executor of empowerment, designed by the community is still limited to mobilization so that it does not have the principle of participation. The principle of independence does not work because it is surrounded by a pattern of aid that does not support the form of independence and it is also realized that independence is only formed as a whole which begins with awareness, suspended with assistance, deferred with the assistance of craftsmen and deferred with craftsmen so that it can be done by delivering the economy. The implementation of this independence is not immediately approved for the release of assistance or in other words, the principle of sustainability is not implemented.

Keyword: Empowerment; Economics; Noken.

PENDAHULUAN

Perekonomian kreatif telah memberikan sumbangan sebesar 7.44% dari pertumbuhan domestik bruto (PDB) Indonesia. Angka ini menjadi pertanda bahwa industri kreatif siap

menjadi kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi nasional, mengingat pertumbuhannya semakin meningkat dan hal ini pun didukung dengan adanya UU ekonomi kreatif yang mengatur ekonomi kreatif dari hulu sampai ke hilir. Perlu dilakukannya lompatan dari perekonomian yang sebelumnya mengandalkan sumberdaya alam dan pertanian, industri, teknologi informasi menjadi perekonomian yang digerakan oleh industri kreatif [1]. Pertumbuhan sektor ini tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat dan hal ini ditunjang dengan pemfokusan anggaran dana desa pada pemberdayaan masyarakat desa dan diyakini dapat mendorong pengembangan kewirausahaan atau entrepreneurship [2]. Pemberdayaan ini berorientasi pada kearifan lokalnya. Dan keragaman Indonesia yang membentuk keragaman budaya memiliki beragam kearifan lokal, demikian halnya dengan penduduk kampung sota kabupaten merauke yang juga memiliki daya tarik karena terletak pada kawasan titik nol antara perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea mempunyai kerajinan tangan turun temurun yaitu penyulaman Noken atau tas dari olahan kulit kayu yang telah menjadi pilar ekonomi keluarga masyarakat setempat. Namun sangat disayangkan bahwa kerajinan sebagai pilar ekonomi keluarga ini tidak mengantar mereka pada kehidupan yang lebih baik bahkan dapat dikatakan bahwa belum mampu menyokong ekonomi keluarga, sehingga secara perlahan keberlanjutan usaha ini mulai bergerak mundur baik dari sisi berkurangnya pengrajin hingga pemasok bahan bakunya. Pemberdayaan yang ditujukan sebagai Perbaikan kelembagaan, Perbaikan Usaha, Perbaikan Pendapatan, Perbaikan Lingkungan, Perbaikan Kehidupan, Perbaikan Masyarakat merupakan harapan perubahan peningkatan ekonomi namun apakah wacana Pemberdayaan masyarakat yang mendorong ekonomi kreatif mampu mendongkrak ekonomi rumah tangga para pengrajin Noken. Empat prinsip yang berfungsi agar pemberdayaan yang dilakukan dapat sukses adalah kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan keberlanjutan [3].

Bertolak dari kondisi ini maka penelitian ini merupakan kajian empat prinsip kesuksesan pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi usaha kerajinan tangan penyulaman Noken.

METODE

Menyoroti pengrajin Noken Kampung Sota Kabupaten Merauke dengan Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang bersumber dari data primer yang diperoleh dari produsen usaha kerajinan tangan penyulaman Noken dan data sekunder dari literatur, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara *snowball sampling*. Yang difokuskan pada beberap hal yakni **Kesetaraan**; kesetaraan dan kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program

pemberdayaan masyarakat. **Partisipasi**; Program yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif. **Kemandirian**; Menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Dalam prinsip ini tidak melihat orang miskin sebagai objek yang tidak mampu tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. **Berkelanjutan**; Program pemberdayaan harus memiliki tujuan yang berkelanjutan yang mana secara perlahan memberikan masyarakat peran yang dominan terhadap pemberdayaan bukan lagi pendamping yang berperan dominan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Prinsip Kesetaraan, Partisipasi, Kemandirian dan Prinsip Berkelanjutan, mendeskripsikan bahwa ketidakberhasilan dalam memberdayakan pengrajin Noken dikarenakan tidak diimplementasikannya empat prinsip kesuksesan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Permasalahan yang terjadi dalam proses pemberdayaan adalah lembaga pelaksanaan pemberdayaan memposisikan dirinya sebagai pihak berkompeten untuk memberi dan mengacu dari kemampuan yang dimilikinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat, di sisi lainnya masyarakat sebagai pihak penerima yang memiliki keterbatasan pengetahuan atau pemahaman tanpa ada pengakuan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang apa yang dijalaninya dan apa yang diinginkannya, hal ini memicu prinsip kesetaraan tidak dilaksanakan pada pemberdayaan masyarakat. Kebanyakan program pemberdayaan telah ditetapkan, dirancang dan ditentukan oleh para pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga yang mendanainya. Keterlibatan masyarakat masih sebatas pada mobilisasi, belum pada tahapan partisipasi. Prinsip kemandirian sebagaimana dua prinsip sebelumnya tidak berjalan karena masih terkukung dengan pola pemberian bantuan cuma-cuma namun disadari bahwa menciptakan kemandirian bukannya hal yang sederhana tetapi memiliki kompleksitas mulai dari proses penyadaran hingga pengembangan. Prinsip keberlanjutan sendiri mengacu pada tercapainya prinsip kemandirian karena kondisi ini akan membentuk pelepasan pendampingan oleh lembaga-lembaga pelaksana pemberdayaan, masyarakat sudah mampu memberdayakan dirinya sendiri, masyarakat memiliki kekuatan finansial maupun ketrampilan mengelola. Pemberdayaan masyarakat didominasi oleh masyarakat itu sendiri. Kegagalan pada prinsip kemandirian ini secara mutlak mengatakan bahwa Prinsip keberlanjutan tidak terlaksana

B. Pembahasan

Bahan baku pembuatan Noken berupa benang yang diolah secara tradisional dari tali atau batang pohon atau tanaman merambat yang merupakan tanaman di hutan lokal yang dapat dikatakan pula sebagai tanaman lokal karena menurut pendapat beberapa responden tanaman tersebut tidak terdapat pada semua wilayah dan hal ini terlihat dari ciri khas masing-masing Noken di tiap wilayah baik dari bahan maupun modelnya, Selain bahan yang berasal dari tanaman, bulu binatang menjadi bahan baku lain dimana untuk kampung Sota pada umumnya menggunakan bulu burung kasuari, burung kasuari sendiri adalah burung khas yang hidup didataran papua termasuk burung khas yang hidup di Merauke, dari sisi bahan baku maka Noken ini adalah kekayaan budaya bangsa yang memiliki keunikan sehingga memiliki nilai jual. Rata-rata pengrajin memperoleh bahan baku dari pemasok yang pada umumnya sering ke hutan untuk berburu, walaupun tidak dipungkiri bahwa sebagian pengrajin mengambil bahan langsung dengan mencari di hutan dan rawa sekitar tempat tinggalnya. Kendala terbesar perolehan bahan baku adalah budaya membakar hutan untuk menangkap hasil buruan, kemarau panjang yang mempertinggi resiko kebakaran. Perkembangan wilayah yang berdampak pada pengurangan hutan serta jarak hutan dengan tempat tinggal yang semakin jauh, pengrusakan lingkungan yang berdampak terhadap berkurangnya tanaman khas bahan baku, keterbatasan pengrajin yang pada umumnya adalah perempuan atau ibu rumah tangga dimana harus membagi waktu untuk mencari bahan dengan kewajiban rumah tangga lainnya sehingga lebih banyak bergantung kepada pemasok yang memiliki ritme kerja tidak menentu atau ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil buruan yang diinginkan. Walaupun demikian seorang informan mengatakan bahwa sudah ada kerjasama antara pengrajin dengan pemasok, para pencari bahan baku akan langsung menjual ke tempat pengrajin sehingga dapat dikatakan bahwa untuk pemasokan bahan baku bukan menjadi kendala jika dilihat dari sisi siapa yang mengadakan bahan baku. Meskipun bukan kendala besar kondisi pasokan bahan tetapi permasalahan ini melilit di sisi pendanaan karena rata-rata pengrajin mengatakan bahwa meskipun harga bahan baku oleh pemasok relatif murah jika dilihat dari tingkat kesulitan memperoleh bahan bakunya yakni lima puluh ribu rupiah, tetapi dengan kondisi perekonomian pengrajin maka jumlah ini sangat besar dan kemampuan beli menjadi rendah, tak dapat disangkal bahwa kondisi ini sesuai dengan analisis tingkat ketimpangan dan karakteristik sosial ekonomi penduduk kabupaten merauke yang dikatakan bahwa penduduk berpendapatan rendah terbesar adalah didesa [4], daya beli yang rendah ini memberikan kelesuan bagi para pencari bahan sebagaimana yang dikatakan oleh dua orang pencari bahan yang kami temui. Beranjak dari pendanaan kami

menelusuri tata kelola keuangan yang dimiliki para pengrajin, item-item yang menjadi catatan adalah, semua pengrajin tidak memiliki tata kelola keuangan, belanja rumah tangga dan belanja usaha adalah sama sehingga tergantung pada kebutuhan yang mana pada saat itu dan bertepatan dengan uang yang ada pada pengrajin sehingga rata-rata yang didahulukan adalah kebutuhan rumah tangga maka perputaran modal usaha menjadi sangat lambat, hal ini perlu dimaklumi jika dilihat dari tingkat pendidikan pengrajin yang berada pada tingkat pendidikan menengah ke bawah, banyak masyarakat kampung lokal memiliki tingkat pendidikan yang rendah [5], dimana ada temuan penelitian yang menyatakan rendahnya pendidikan menjadi faktor penentu rendahnya nilai tambah untuk pembangunan ekonomi [6]. Hasil penelitian pada beberapa kampung lokal juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki keterbatasan dalam hal membuat perencanaan untuk masa depan dan membuat anggaran. Keterbatasan ini dapat dipahami mengingat masyarakat yang pada umumnya merupakan masyarakat adat, kondisi sosial ekonomi belum berkembang [7]. Untuk pertanyaan apakah ada sumber dana lain, maka dikatakan bahwa untuk usaha mereka ini masih bertumpu pada dana pribadi dan pinjaman lunak.

Pemasaran produk masih dilakukan secara offline dirumah atau di kios pada perbatasan Indonesia dan Papua New Guenie sehingga sangat bergantung kepada jumlah pengunjung atau wisatawan. Desain Noken masih tradisional dan sejenis, perbedaan hanya terletak pada ukurannya, belum ada inovasi terkait desain ini. Selain dari proses produksi yang lama, mulai dari pengolahan bahan baku agar dapat dijadikan benang hingga penyulaman maka perputaran penjualan pun sangat rendah dalam sehari dipastikan belum mampu menjual satu produk pun dan hal ini berlaku untuk semua pengrajin. Wawancara dengan beberapa pengunjung ada yang mengungkapkan bahwa produk Noken ini merupakan oleh-oleh khas merauke yang juga diminati namun jarak antar kota Merauke-Sota yang cukup jauh menjadi salah satu kendala dan menjadi pertimbangan pembeli serta pemikiran apakah produk yang diinginkan tersedia sesuai harapan, sehingga moment wisata keluarga yang akan digunakan untuk membeli, apabila ada teman yang menginginkan oleh-oleh tersebut harus menunggu hingga ada moment tersebut, tidak ada pengunjung yang khusus ke perbatasan untuk membeli Noken, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kekuatan usaha Noken di kampung sota terletak pada keunggulannya sebagai kota wisata serta diantara berbagai kelemahannya terdapat item promosi dan pokok sorotannya adalah pemasaran online [8]. Kondisi ini seakan-akan memberi gambaran bahwa para pengrajin ini belum tersentuh pemberdayaan masyarakat, hal ini sangat kontras karena

untuk Kampung di kabupaten Merauke, implementasi dana desa diprioritaskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat[9] [10] [11].

Apakah program pemberdayaan tidak terlaksana di kampung sota?, apakah pengrajin Noken belum tersentuh program pemberdayaan?. Menurut aparat kampung bahwa kampung Sota sama halnya dengan kampung-kampung lainnya dikabupaten merauke bahwa fokus penyerapan dana desa adalah pada pemberdayaan masyarakat dan selain dana desa maka pemberdayaan masyarakat ini juga sering kali dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi baik dalam program KKN maupun pengabdian masyarakat oleh dosen, dan program-program ini menyentuh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung termasuk pengrajin Noken. Pengrajin membenarkan mereka juga bagian dari masyarakat yang pernah menerima bantuan-bantuan pemerintah, dan mereka pernah terlibat dalam program-program pemberdayaan baik oleh pemerintah maupun oleh perguruan tinggi namun tidak dalam posisi sebagai pengrajin Noken, meskipun diakui pula bahwa mereka ada yang menempati kios-kios yang disediakan pemerintah guna memasarkan produk Nokennya, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu ada beberapa pengrajin memilih menitipkan produk Nokennya pada pedagang lainnya. Para pengrajin belum pernah mengikuti pembinaan khusus tentang kerajinan Noken. Ulasan-ulasan diatas menjadi gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat telah terlaksana di kampung Sota, penelusuran lebih lanjut empat prinsip kesuksesan pemberdayaan .

Kesetaraan; penekanan pada prinsip kesetaraan atau kesejajaran ini mendudukan masyarakat atau memposisikan seseorang dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun pada kondisi ini mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain, atau dapat dikatakan bahwa disinilah terbentuk proses saling belajar. Prinsip ini tidak terlaksana oleh karena hubungan yang dibangun adalah yang memberi dan yang menerima tidak ada timbal balik diantara masyarakat dengan yang melaksanakan program pemberdayaan dan itupun lebih banyak kepada program-program pemberdayaan yang tidak bersentuhan langsung dengan penyulaman Noken. Selain dari situasi umum ini maka penyulaman Noken sebagai keahlian turun temurun serta memiliki proses produksi yang rumit sehingga mempengaruhi sudut pandang rata-rata pengrajin bahwa sulit untuk berbagi bukan hanya dari sisi pemberi tetapi juga sebagai penerima bahkan beberapa informan menguatirkan akan terkikis budaya penyulaman Noken tradisional karena keengganan generasi muda atau anak-anak didalam keluarganya untuk mempelajari dikarenakan proses dan waktu yang dibutuhkan serta di ikuti oleh tersedianya berbagai tas dengan desain dan harga yang

terjangkau dan tersedianya benang-benang modern atau bahan-bahan lain yang dapat disubstitusikan.

Partisipasi, Program yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat semestinya program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat, serta diperlukan proses pendampingan dan pelibatan pendamping dengan komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Prinsip Kesetaraan dan Partisipasi sesungguhnya berkaitan erat. Dari informan terungkap bahwa belum terlaksananya kedua prinsip ini disebabkan oleh belum ada program yang menyentuh langsung pada kerajinan penyulaman Noken baik produksi, desain, tata kelola atau pencatatan keuangannya, meskipun diantara mereka pernah mengikuti program pemberdayaan keuangan tetapi lebih kepada pencatatan keuangan umum sedangkan rendahnya tingkat pemahaman pengrajin menghendaki adanya pembelajaran praktis. Pelaksanaan pemberdayaan pada umumnya tidak melibatkan masyarakat baik pada perencanaan hingga evaluasi, sehingga program pemberdayaan tidak menjawab kebutuhan masyarakat pengrajin, dari hasil wawancara kami menggaris bawahi program pemberdayaan yang diinginkan dan dipandang dapat mendorong tercapainya dua prinsip ini yakni, Program pemberdayaan tentang desain produk, pemasaran offline dan online, tata kelola keuangan, permodalan dan kemitraan. Situasi ini tidak jauh berbeda dengan tantangan-tangan yang dihadapi dalam upaya pertumbuhan masyarakat dari sektor kerajinan tangan lokal yang tersebar diberbagai wilayah nusantara diantaranya, terbatasnya SDM yang berperan sebagai 'tim kreatif' yang memang memiliki spesialisasi dalam inovasi dan diversifikasi produk lurik [12]. Pola pikir masyarakat kurang inovatif dikarenakan kurangnya lembaga pendidikan dan pembinaan anyaman kerajinan untuk masyarakat sehingga kerajinan anyaman tangan sulit berkembang dan kurangnya pemasaran mengakibatkan produk kerajinan anyaman sulit bersaing [13], Pengembangan ekonomi kreatif terkendala oleh sulitnya harapan dan realisasi untuk mencapai efektifitas dan efisiensi, faktor penghambatnya terletak pada 4P (*product, price, place, promotion*) [14].

Kemandirian, menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Dalam prinsip ini tidak melihat orang miskin sebagai objek yang tidak mampu tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit, prinsip ini berbanding terbalik dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dimana pada umumnya pembangunan masyarakat desa selain berfokus pada infrastruktur atau fisik maka lebih berupa pemberian langsung habis pakai atau bantuan cuma-cuma, hal ini memang tidak dapat disalahkan karena sudut pandang yang identik dengan pembangunan adalah sesuatu yang nyata terlihat, masyarakat cenderung memposisikan diri sebagai pihak yang tidak

mampu yang membutuhkan perhatian dan bantuan, pada umumnya kehadiran masyarakat pada program pemberdayaan yang bersifat pengembangan diri atau penambahan pengetahuan dan wawasan akan dihadiri dikarenakan insentif tunai yang akan diterima dan bukan berdasarkan keinginan dan kebutuhan pribadinya. Demikian pula sebaliknya bahwa lembaga pelaksana pemberdayaan memposisikan masyarakat sebagai obyek yang layak dan perlu dibantu berupa fisik dan bantuan langsung cuma-cuma. Kondisi ini menempatkan prinsip kemandirian sebagai suatu prinsip yang sulit dan mustahil dicapai, hendaklah disadari pula bahwa kemandirian ini bukan hanya terletak pada persepsi tetapi merupakan sebuah proses yang terbentuk dari kerja dan waktu melalui upaya penyadaran, pelatihan, pengorganisasian dan pengembangan. Persoalan pemberdayaan masyarakat hendaknya berupa penyadaran masyarakat, pemberian pengetahuan, mendorong perubahan, pemberian peluang sehingga kemandirian akan tercipta dengan sendirinya[15].

Berkelanjutan, program pemberdayaan harus memiliki tujuan yang berkelanjutan, mengartikan bahwa hal ini bukan sesuatu yang instan, implusif dan sebuah pemenuhan target pelaksanaan program melainkan sebuah proses yang terus-menerus, Program berkelanjutan akan mendorong kemandirian. Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat tidak saling mendukung sehingga menjadi dilema bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Sebaiknya program pemberdayaan berkelanjutan saling menunjang dan mendukung dalam program, dimana pendampingan program berkelanjutan merupakan kekuatan internal dalam pendampingan masyarakat pengrajin.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi Usaha Kerajinan Tangan Penyulaman Noken belum di implementasikan sebagaimana mestinya sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari pemberdayaan itu sendiri yakni belum adanya perubahan-perubahan yang memberi nilai ekonomis baik dari sisi kreatifitas masyarakat maupun peningkatan pendapatan rumah tangga pengrajin dan hal ini membutuhkan peran bersama masyarakat dan lembaga pelaksana pemberdayaan. Para pengrajin harus lebih aktif dalam menjalankan kegiatan penyulaman Noken rumah tangganya maupun membentuk kelompok atau organisasinya. Pengrajin harus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kampung, maupun Pemda Kabupaten Merauke serta perguruan tinggi, agar diberikan pendampingan serta memberikan pemahaman tentang berorganisasi dan pengrajin diharapkan melakukan inovasi atau desain pada produk Noken agar bisa bersaing dengan produk lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementrian Komunikasi dan Informatika, “Ekonomi Kreatif adalah Pilar Perekonomian Masa Depan,” 2015.
- [2] Kemenko PMK, “2020, Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa,” 2020.
- [3] T. Mardikanto and P. Soebiato, “Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik,” 2012.
- [4] R. P. Bano, “Analisis Tingkat Ketimpangan Dan Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk,” *J. Ilmu Ekon. Sos.*, vol. 10, no. 2, pp. 46–58, 2019.
- [5] S. Syahrudin, “Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Kabupaten Merauke,” *J. ILMU Ekon. Sos.*, vol. 9, no. 2, pp. 110–116, 2018.
- [6] S. Seran, “Pendidikan dan Karakteristik Pelaku UMKM Serta Kontribusinya Terhadap Perekonomian Nasional,” *JPBM (Jurnal Pendidik. Bisnis dan Manajemen)*, vol. 2, no. 1, pp. 12–26, 2016.
- [7] I. C. Laode, I. Herdjiono, and E. J. Martanti, “Perilaku Keuangan Masyarakat Kampung Di Merauke,” *J. Muara Ilmu Ekon. dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, pp. 95–103, 2018.
- [8] S. Batlajery and C. H. S. Wati, “Development Strategy of Noken Product on Local Community in Sota Merauke,” *Int. J. Soc. Sci. Bus.*, vol. 3, no. 2, pp. 145–153, 2019.
- [9] S. Syahrudin, “Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke,” *J. ILMU Ekon. Sos.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–7, 2019.
- [10] A. P. Tjilen, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility)(Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik)*. Deepublish, 2019.
- [11] S. Waas, S. M. Ungirwalu, and H. Oja, “Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kampung Wasur Distrik Merauke,” *Soc. J. Ilmu Adm. dan Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 91–103, 2012.
- [12] B. R. M. B. Irawan and A. M. Susilo, “Pengembangan Industri Lurik Tradisional Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal Dan Mendukung Pembangunan Pariwisata Daerah,” *Cakra Wisata*, vol. 20, no. 2.
- [13] A. Razak, “Faktor Penghambat Kerajinan Anyaman Tangan Di Perbatasan Sajian Besar Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,” *Sosiohumaniora*, vol. 19, no. 3, pp. 213–217, 2017.
- [14] I. G. A. O. Netrawati, I. G. P. B. Suastina, and J. Ali, “Hambatan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Kasus Pada Perajin Kain Tenun Tradisional Dusun Sade),” *MEDIA BINA Ilm.*, vol. 14, no. 4, pp. 2337–2350, 2019.
- [15] H. Suryo, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat,” *Transformasi*, vol. 1, no. 29, 2017.